

## PENDAHULUAN

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang di singkat dengan ABRI adalah salah satu komponen utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. ABRI terdiri dari ABRI sukarela dan ABRI wajib. ABRI sukarela adalah warga negara yang diikuti-sertakan secara sukarela dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam Angkatan Bersenjata - Republik Indonesia. Sedangkan ABRI wajib adalah warga ne - gara yang diikuti-sertakan secara wajib dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam Angkatan Bersenjata Repub - lik Indonesia selama jangka waktu tertentu (UU no. 20 Th.- 1982).

Dalam mengemban tugasnya, ABRI sangat membutuhkan seorang pimpinan, Dimana kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam pelaksanaan menggunakan pengaruh dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang dipimpinnya sehingga dari pihak yang dipimpin itu tumbuh dan berkembang keyakinan dan ketaatan untuk bekerja sama yang harmonis yang diperlukan dalam penunaian tugas-tugasnya yang di pikulnya tanpa banyak menggunakan alat-alat dan waktu, tetapi dengan banyak keserasian antara apa yang menjadi sasaran kelompok/kesatuan dengan apa yang menjadi tujuan yang ditentukan oleh seluruh organisasi yang bersangkutan (Majalah, pembimbing No. 35, Th : 1981).

Pemimpin merupakan penggerak setiap usaha dan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinannya harus menjadi dasar yang menjiwai semua sumber dan potensi secara serentak dan menyeluruh untuk mencapai tujuan.

Tindakan memimpin atau cara memimpin atau lebih populer lagi dengan sebutan kepemimpinan merupakan suatu pengetahuan yang dapat dipelajari dan dipraktekkan oleh siapa saja, Kepemimpinan bukan merupakan suatu pembawaan - yang dilahirkan, bukan pula karena keturunan, tetapi kepemimpinan itu adalah suatu kecakapan yang dapat dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai kepandaian memahami azas-azas kepemimpinan yang sehat, penggunaan prinsip-prinsip serta tehnik kepemimpinan yang sebaik-baiknya.

Kepemimpinan merupakan kepastian dalam hidup berkelompok, sehingga sulit mengatakan tiadanya pemimpin dalam kehidupan berkelompok, atau dengan kata lain bahwa dalam setiap kehidupan berkelompok senantiasa ditentukan adanya kepemimpinan, Sedangkan kepemimpinan itu sendiri dapat terwujud oleh karena hasil pribadi dari anggota kelompok atau masyarakat, yang memang mengharapkan perlindungan dari seorang pemimpin rakyat.

Seseorang yang dianggap dapat memberikan perlindungan maka ia dianggap/dijadikan pemimpin, Dan kepemimpinan itu sendiri tidak terlepas daripada adanya wewenang dan kekuasaan pada tangan pemimpin, Sehingga kepemimpinan, kewenangan dan kekuasaan hampir tidak bisa dibeda-bedakan atau dipisahkan.

Pada umumnya seorang dianggap pemimpin atau menduduki posisi pemimpin karena kecakapan ( skill ) dan kemampuan ( Ability ) yang dimilikinya, oleh karena pemimpin adalah pelindung dari kelompoknya maka ia harus punya pengaruh - da lam pengambilan keputusan orang lain, Serta menentukan nasib mereka.

Disamping itu pula kepemimpinan bisa berjalan dengan lancar dan harmonis apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya persyaratan itu adalah :

- Mengenal dan menghayati norma-norma dari kelompok,Dimana ia menjadi pemimpin.
- Mengenal kebutuhan dan harapan serta keinginan kelompok - yang bersangkutan.
- Kebutuhan yang harus diketahuinya adalah kebutuhan aktuil kelompoknya, Dan karenanya ia harus maju dan lebih maju daripada kelompoknya, Akan tetapi tidak terlalu maju agar masih bisa difahami dan diikuti oleh kelompoknya.

Dengan demikian dapat dikatakan : Bahwa kepemimpinan an, adalah tindakan/perbuatan dari seseorang pemimpin yang m menyebabkan baik anggota kelompok ataupun anggota kelompok masyarakat, maju kearah tujuan-tujuan tertentu, Sebab pada hakekatnya maksud kepemimpinan adalah untuk menimbulkan - dan menggerakkan partisipasi banyak orang dalam pencapaian - an tujuan bersama dengan menghidupkan motivasi yang kuat pada orang-orang itu sehingga mereka atas kemauanya sendiri memberikan partisipasinya yang maksimal; Sehubungan dengan i itu maka sejak terbentuknya ABRI pada tahun 1945 faktor -

pemimpin sangat memainkan peranan penting dalam perkembangannya. Baik untuk kelompok-kelompok ABRI yang tersebar menjangkau seluruh perjuangannya masing-masing dalam rangka perjuangan nasional yang besar maupun untuk ABRI secara keseluruhan apalagi karena ABRI dan khususnya TNI telah terbentuk dan tumbuh sebagai gerakan yang dapat disamakan dengan satu kebangkitan rakyat secara spontan. Di pusatpun ABRI harus dapat mengembangkan kepemimpinannya untuk dapat mempersatukan segenap perjuangan yang dilakukan di daerah-daerah guna mencapai tujuan bersama, meskipun ABRI merupakan organisasi yang pada dasarnya adalah pertahanan keamanan, namun sejak permulaan kepemimpinan militer saja, perjuangan menghadapi penjajahan Belanda yang sejak semula merupakan perjuangan rakyat yang dengan unsur ABRI merupakan bagiannya, oleh sebab itu harus lebih diperhatikan seluruh aspek kehidupan bangsa dan rakyat kalau hendak mencapai hasil yang baik.

Dari uraian di atas, diperlukan adanya kejelasan tentang kepemimpinan ABRI tersebut, dan masih perlu dipertanyakan lagi, apakah kepemimpinan didalam ABRI itu sudah relevan atau belum menurut hukum Islam. (Sayidiman Suryohadiprojo Letjen, Purn. 1992 : 217)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا وَلَنْ تُبْتِغِ اهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ  
مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَالِكٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ - الرعد : ٧»

"Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an (berisi) hukum dan dalam bahasa Arab. Demi jika engkau ikut hawa nafsu mereka. Setelah datang ilmu pengetahuan kepadamu, maka tidak ada bagimu wali dan tiada pula yang memelihara dari (siksa) Allah," (Depag. RI. hal : 375)



### B. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas dan dipelajari adalah tentang Peranan Kepemimpinan ABRI untuk ditinjau dari aturan-aturan yang terdapat dalam Islam atau norma - norma Islam Lebih jelasnya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Kepemimpinan ABRI.

### C. Pembatasan masalah

Masalah Peranan Kepemimpinan ABRI untuk ditinjau -  
dari Hukum Islam masih bersifat umum dan bersegi banyak, -  
oleh karena itu, masih memerlukan pembatasan studi yang di  
rencanakan ini, Penulis batasi agar lebih jelas dan lebih  
tegas dalam pembahasannya. Adapun Pembatasan masalah itu -  
yaitu dari segi :

- Subjeknya : Seluruh Anggota ABRI baik sukarela maupun wajib.
- Objeknya : Peranan Kepemimpinan ABRI.
- Waktunya : Setelah proklamasi kemerdekaan (1945) sampai akhir pelita IV (1988).
- Tempatnya : Seluruh Wilayah Indonesia.

Dengan demikian, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Kepemimpinan ABRI  
pada tahun 1945 - 1988 di Indonesia.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional lagi, setelah di kemukakan latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan Pembatasan masalah, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana diskripsi tentang Peranan Kepemimpinan ABRI?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Peranan Kepemimpinan ABRI?

### E. Tujuan study

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan study adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran secara diskriptif tentang Peranan Kepemimpinan ABRI.
2. Untuk mengetahui apakah proses Peranan Kepemimpinan ABRI yang berlangsung di Indonesia sekarang ini sudah sesuai atau belum dengan aturan Hukum Islam.

### F. Kegunaan study

Hasil study ini diharapkan bisa bermanfaat, paling tidak untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian tingkat berikutnya yang lebih mendalam.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan -

Peranan Kepemimpinan ABRI yang lebih baik dan lebih sesuai dengan dinamika perubahan yang ada pada masa-masa berikutnya.

## G. Metodologi

1. Data-data yang akan dihimpun

Data-data yang akan dihipung dalam penelitian ini secara global dapat disebutkan sebagai berikut :

- Sejarah Kepemimpinan ( Pimpinan A B R I ) secara garis besar dari tahun 1945 - 1988
- Kedudukan ABRI dalam UUD 1945
- Kepemimpinan ( Pimpinan A B R I ) di dalam sistem Demokrasi Pancasila
- Konsepsi sosial politik ABRI
- Keberhasilan ABRI dalam menegakkan dan memimpin negara

## 2. Sumber data

Data-data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini diperoleh dari :

1. Sumber data primer, yang terdiri dari :
  - a. Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini memakai UU no: 20 Th. 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
  - b. Dispen ABRI KODAM V BRAWIJAYA
2. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan penjelasan dari sumber utama serta bahan-bahan pustaka lain yang masih ada kaitan dan relevansinya.



### 3. Teknik Penggalian Data

Dari sumber-sumber data yang digunakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian masalahnyatersebut merupakan riset pustaka. Adapun tehnik penggalian data tersebut adalah dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada. Kemudian dari telaah dan analisisitu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

#### 4. Metode analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Pengolahan data dengan cara editing yakni memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.
2. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan menyistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Penemuan hasil ialah melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan dalil-dalil untuk memperoleh Simpulan-simpulan.

## 5. Metode pembahasan

Hasil simpulan dari analisis data tersebut akan di-  
bahas dan dianalisis dengan beberapa metode, yaitu :

1. Metode induktif ialah cara penyajiannya dimulai dari - fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil simpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif yaitu cara penyajiannya dimulai dari - teori-teori, dalil-dalil, generalisasi-generalisasi - dan selanjutnya dikemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya ditarik simpulan yang bersifat umum.
3. Metode komperatif ialah membandingkan antara ketentuan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur masalah Kepemimpinan ABRI dengan aturan hukum Islam yang se- lanjutnya di rumuskan kesimpulannya.